



SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2025 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan subsektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki potensi kelapa sawit yang baik untuk dikelola dan dimanfaatkan sehingga dapat mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, perlu pengaturan mengenai Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2027;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Konawe Selatan.
4. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
9. *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
10. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian ksesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan

mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

12. Akses Pasar adalah kegiatan melakukan fasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual, agar terjadi komunikasi dan transaksi dalam rangka pengembangan industri sawit.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Sistematika Dokumen RAD KSB sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Integrasi Program dan Kegiatan

BAB III Penyelenggaraan Rencana Aksi

BAB IV Penutup

- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM PELAKSANA DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Daerah RAD KSB.
- (2) Tim Pelaksana RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, perangkat daerah terkait di Daerah, akademisi, masyarakat, swasta, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pelaksana RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB.

- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dengan melibatkan perangkat daerah terkait di Daerah, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi publik;
 - b. konsultasi publik;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB diperlukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana RAD-KSB.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah secara tertulis disampaikan secara langsung maupun elektronik kepada Tim Pelaksana RAD-KSB.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kebun Sawit berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB melalui Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Tim pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Konawe Selatan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

RAD-KSB dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 20 Januari 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.
SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 20 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.
ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR.....TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025 - 2027

Penerapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- 4 Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan Industri Kelapa Sawit berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan melalui Kolaborasi

[illegible]

2.1	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan Kebun Kelapa Sawit	1	Melakukan pemutakhiran informasi Geospasial tematik (IGT) Tutupan Kelapa Sawit	Tersedia IGT tutupan Kelapa Sawit yang termuktahir	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 2 3 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Badan Riset & Inovasi Daerah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Konawe Selatan	1 2 3 4 5	APBD Kab. Konse APBD Prov. Sultra APBN Sumber Pembiayaan Lain Badan Pengelola Dana Perkebunan
2.2	Pelatihan pemetaan partisipatif			Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif dari OPD, Perusahaan dan masyarakat	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 2	Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan/NGO	1 2 3	APBD Kab. Konse APBN Sumber Pembiayaan Lain
2.3	Pemetaan kawasan perkebunan kelapa Sawit			Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan Sebaran Perkebunan Jalur pasok ke Pabrik Kelapa Sawit	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 2	Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan/NGO	1 2 3	APBD Kab. Konse APBN Sumber Pembiayaan Lain

2.4	Penyusunan Peta Arah Pengembangan Kelapa Sawit dan Perlindungan Kawasan Bernilai Penting Secara Lingkungan, Sosial dan Ekonomi			Tersedianya peta Arah Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit 2023 – 2043	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 APBD Kab. Konsel
									Badan Riset & Inovasi Daerah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan ATR/BNP Konahe Selatan	2 APBN 3 Sumber Pembiayaan Lain
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
3.1	Peningkatan Koordinasi dan Sosialisasi regulasi Usaha perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 APBD Kab. Konsel
3.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Mengikuti Kegiatan Musrenbang Desa yang di laksanakan dalam rangka menginformasikan tentang Kelapa Sawit	2025	2026	2027		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [BAPEDDA Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa [BPMD]	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu [DPTSP] Pelaku Usaha Perkebunan Besar Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 APBD Kab. Konsel 2 APBN 3 Sumber Pembiayaan Lain 4 Badan Pengelola Dana Perkebunan

3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang	2025	2026	2027	Dinas PUPR dan Tata Ruang	Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan	1	APBD Kab. Konse
								Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	2	APBN
								Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4	Badan Pengelola Dana Perkebunan
								Badan Riset dan Inovasi Daerah		
								Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
								Bagian Perencanaan & SDA		
3.4	Memperkuat Peran Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam pelaksanaan RAD KSB	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sekretariat Forum Multi Pihak dan Tugas Kewenangan Forum Multi Pihak KSB	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan	1	APBD Kab. Konse
								Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	2	APBN
								Badan Pusat Statistik (BPS)	3	Sumber Pembiayaan Lain
								Badan Riset dan Inovasi Daerah	4	Badan Pengelola Dana Perkebunan

												Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Bagian Perekonomian & SDA		
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN /													
4.1	Pembangunan dan Peningkatan kualitas jalan pertanian di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di Kecamatan dan Desa Penghasil Kelapa Sawit	2025	2026	2027	Dinas Tata ruang dan Permukiman/PUPT	Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan	1	APBD Kab. Konse				
								Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	2	APBN				
								Badan Pusat Statistik (BPS)	3	APBD Prov. Sultra				
								Badan Riset dan Inovasi Daerah	4	Sumber Pembiayaan Lain				
								Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5	Badan Pengelola Dana Perkebunan				
								Bagian Perekonomian & SDA						
4.2	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya : pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil komoditi Kelapa Sawit	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Frekuensi, koordinasi dan sinkronisasi program dan jumlah prasarana yang disediakan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kantor Pertanahan Nasional/ATR BPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan	1	APBD Kab. Konse				
								Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	2	APBN				
								Badan Pusat Statistik (BPS)	3	APBD Prov. Sultra				
								Badan Riset dan Inovasi Daerah	4	Sumber Pembiayaan Lain				
								Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5	Badan Pengelola Dana Perkebunan				

[illegible]

5.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				2025	2026	2027	Balai Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan BPSB Prov. Sulawesi Tenggara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	APBD Prov. Sultra
5.3	Pembangunan Nurseri [Logbun]							Memperkuat Logistik benih Perkebunan Penyediaan benih Unggul Lokal dan Nasional	Balai Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan BPSB Prov. Sulawesi Tenggara Kantor Pertanahan Nasional/ATR EPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan	1 2	APBD Kab. Konse APBN
5.4	Fasilitasi kelompok kerja antar OPD di dalam upaya kepatuhan hukum dalam Tata Kelola Usaha Perkebunan Sawit							Rencana Kerja dan Dukungan Anggaran dalam upaya memperkuat kelompok kerja antar OPD di dalam upaya kepatuhan hukum dalam tata Kelola Usaha Perkebunan Sawit seperti PUP terpadu dengan melibatkan lintas OPD dan Partisipasi Publik di dalamnya	Kantor Pertanahan Nasional/ATR EPN Konawe Selatan Mitra Pembangunan	1	APBD Kab. Konse
									Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Riset dan Inovasi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3 4	APBD Prov. Sultra Sumber Pembiayaan Lain
									Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	2	APBN

6.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah fasilitator GAP di Kabupaten Konawe Selatan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 2 3 4	Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa [BPMMD] Mitra Pembangunan Pelaku Usaha Perkebunan Besar Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	1 2 3 4 5	APBD Kab. Konse APBD Prov. Sultra APEN Sumber Pembiayaan Lain Badan Pengelola Dana Perkebunan APBD Kab. Konse
			Jumlah tenaga teknis yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Perkebunan kelapa Sawit	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	Sertifikasi kementerian Pertanian	1	APBD Kab. Konse
6.3	Penyuluhan Good Agricultural Practise bagi pekebun		Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada di Desa Se Kab. Konawe Selatan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	Pelaku Usaha Perkebunan Besar Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	2 1	Sumber Pembiayaan Lain APBD Kab. Konse
6.4	Pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K, swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala		Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN dan Non ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di Desa penghasil kelapa sawit	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	2	Sumber Pembiayaan Lain APBD Prov. Sultra

6.5	Penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit				Jumlah BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Konse	APBD Kab. Konse
7	Program Peningkatan Akses Pendanaan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit											
7.1	Sosialisasi akses pendanaan dari perbankan lembaga keuangan lainnya				Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya.	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Sumber lain yang tidak mengikat	
										Perbankan, BANK BPD, BANK BRI, BANK Mandiri	Perbankan	
7.2	Penyediaan Sarana Prasarana pengembangan Sumberdaya manusia Pekebun				Terpenuhinya persyaratan teknis dalam untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan secara ilegal	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	APBD Kab. Konse	
										Perbankan, BANK BPD, BANK BRI, BANK Mandiri	Perbankan	
8.3	Peningkatan sumberdaya manusia pekebun melalui pelatihan, edukasi, konseling, pendampingan dan fasilitasi				Mendukung petani swadaya dalam memperbaiki fasilitas untuk peningkatan produktivitasnya	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Badan Pengelola Dana Perkebunan	

[illegible]

10.3	Pendampingan kelembagaan pekebun			Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di desa penghasil kelapa sawit secara berkala	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Kab. Konse
10.4	Pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan (termasuk Pabrik Kelapa Sawit) dan lembaga pekebun			Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di desa penghasil kelapa sawit	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Kab. Konse
10.5	Pengembangan kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi perkebunan			Jumlah kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi perkebunan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Prov. Sultra APBN APBD Kab. Konse
10.6	Sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi komoditi perkebunan			Terselenggaranya sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Prov. Sultra APBN APBD Kab. Konse
									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	APBD Prov. Sultra

10.10	Fasilitasi rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Kabupaten Konawe Selatan		Terselenggaranya pelaksanaan rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Kab. Konse
10.11	Pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Kabupaten Konawe Selatan		Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun	2025	2026	2027	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Prov. Sultra Badan Pengelola Dana Perkebunan APBD Kab. Konse
10.12	Tera timbang perusahaan dan pengumpul sawit		Jumlah timbangan yang telah di tera Timbangan	2025	2026	2027	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi dan UMKM	APBD Prov. Sultra Badan Pengelola Dana Perkebunan APBD Kab. Konse APBD Prov. Sultra
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting								
11.1	Kordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida		Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Polres Konawe Selatan	APBD Kab. Konse APBN Sumber Pembiayaan Lain

Bagian Hukum
Produsen & Penyalur Pupuk

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Penerapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- 1 Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan
- 2 Mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan
- 3 Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan perkebunan sawit sehingga tidak
- 4 Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk Kelapa Sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di

No	KEGIATAN (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan	
				2025	2026	2027				
KOMPONEN PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN										
12	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
12.1	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH			Dokumen RPPLH Kabupaten Konawe Selatan	2025	2026	2027	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	APBD Kab. Konse APBD Prov. Sultra APBN
12.2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			Jumlah dokumen LH beserta persetujuan lingkungan hidup yang telah diberikan pada perusahaan perkebunan	2025	2026	2027	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse
12.3	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	2025	2026	2027	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse
12.4	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH			Jumlah Sanksi Lingkungan yang ditindaklanjuti	2025	2026	2027	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Prov. Sultra
13	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
13.1	Pengadaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)			Jumlah sapras PLTB	2025	2026	2027	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Konawe Selatan	APBD Kab. Konse

13.3	Monitoring hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun		Jumlah tindak lanjut hasil-hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala tindak lanjut hasil pemantauan titik api di kebakaran lahan dan kebun	2025	2026	2027	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Konawe Selatan	APBD Kab. Konse
13.4	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman perkebunan, terdiri dari :		Jumlah pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan	2025	2026	2027	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Kab. Konse
14	a) Pembangunan water management di areal perkebunan rakyat b) Pengadaan alat mesin pertanian (excavator) c) Pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan							Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Sumber Pembiayaan Lain Badan Pengelola Dana Perkebunan

14.1	Meningkatkan jumlah perusahaan dan petani/peternak yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan		Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani/peternak yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan Peternakan	2025	2026	2027	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse
14.2	Kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan		Jumlah hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2025	2026	2027	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Prov. Sultra Perbankan
14.3	Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sultra		Jumlah data Base Calon Petani dan Calon Lahan untuk Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pengelola Dana Perkebunan APBD Kab. Konse
14.4	Kajian Uby Kayu Sebagai Tanaman Sela di Tanaman Belum Menghasilkan Kelapa Sawit		Tersedia hasil kajian dan rekomendasi	2025	2026	2027	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Balai Pemetaan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Sultra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pengelola Dana Perkebunan Badan Pengelola Dana Perkebunan
14.5	Kajian Integrasi Sapi di Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit		Tersedia hasil kajian dan rekomendasi	2025	2026	2027	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pengelola Dana Perkebunan

14.6	Penyusunan Model Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pada Industri Kelapa Sawit di Konaawe Selatan		Tersedia hasil kajian dan rekomendasi	2025	2026	2027	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pengelola Dana Perkebunan
15	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
15.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Pangan, hortikultura, dan Perkebunan		Luasan Lahan yang dikendalikan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD Prov. Sultra
15.2	Pengamatan dan pelaporan OPT		Laporan pengamatan OPT	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD Prov. Sultra Sumber Pembiayaan Lain
16	Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi								
16.1	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energi terbarukan		Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi alternatif Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan Kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi terbarukan	2025	2026	2027	Badan Riset dan Inovasi daerah [BRIDA]	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Kab. Konse APBN Sumber Pembiayaan Lain
16.2	Pengembangan Biodiesel untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan		Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel	2025	2026	2027	Badan Riset dan Inovasi daerah [BRIDA]	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBN

16.3	Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Masyarakat [Pamigo]	Mendukung program pemerintah dalam penyediaan minyak goreng curah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.	2025	2026	2027	Dinas Ketahanan Pangan	Bagian Ekonomi Serda	APBD Kab. Konse
------	--	---	------	------	------	------------------------	----------------------	-----------------

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

Penerapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- 1 mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui
- 2 melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketnagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan
- 3 memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD.
- 4 melaksanakan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

No	KEGIATAN (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
D 17	KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA Program Perizinan Usaha Pertanian							
17.1	Review terhadap pencapaian dan kendala fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat pada masing- masing perusahaan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Dokumentasi hasil identifikasi pencapaian dan kendala perusahaan dalam fasilitasi pembangunan	2025	2026	2027	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse APBD Prov. Sultra
17.2	Lokakarya dengan Pelaku Usaha untuk merumuskan upaya percepatan dan model fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit atau model lainnya sesuai Permentan 18/2021	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Dokumen skema upaya percepatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai dengan pasal	2025	2026	2027	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse APBD Prov. Sultra
17.3	Penyelesaian perselisihan/konflik kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Termediasi perundingan antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan dalam upaya penyelesaian perselisihan/konflik kemitraan	2025	2026	2027	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse APBD Prov. Sultra
18	Program Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain							

18.1	Pembentukan tim mediasi penanganan sengketa/konflik lahan di Kabupaten Konawe Selatan			Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan di Kabupaten Konawe Selatan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pertanian Nasional/ATR BPN	Badan Pertanian Nasional/ATR BPN	APBD Kab. Konse
18.2	Penyusunan data pemetaan kasus pertanahan di Kabupaten Konawe Selatan			Jumlah data pemetaan kasus pertanahan di Kabupaten Konawe Selatan	2025	2026	2027	Badan Pertanian Nasional/ATR BPN Kab. Konawe Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Badan Pertanian Nasional/ATR BPN Polres Konawe Selatan Kejaksaa Negeri Konse	APBN APBN APBD Kab. Konse Sumber Pembiayaan Lain
18.3	Pembentukan tim reforma agraria tingkat Kabupaten Konawe Selatan			Jumlah Luasan Objek Reformasi Agraria (TORA)	2025	2026	2027	Badan Pertanian Nasional/ATR BPN Kab. Konawe Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pertanian Nasional/ATR BPN Polres Konawe Selatan Kejaksaa Negeri Konse	APBN APBD Kab. Konse Sumber Pembiayaan Lain
18.4	Penyelesaian sengketa pada lahan HGU			Tim Penyelesaian Konflik	2025	2026	2027	Badan Pertanian Nasional/ATR BPN Kab. Konawe Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pertanian Nasional/ATR BPN Polres Konawe Selatan Kejaksaa Negeri Konse	APBN APBD Kab. Konse Sumber Pembiayaan Lain

18.5	Evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan			Jumlah hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan berkurang sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2025	2026	2027	Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN Kab. Konawe Selatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kejaksaa Negeri Konse	APBN
									Bagian Hukum Setda	APBD Kab. Konse	Sumber Pembiayaan Lain
									Bagian Pemerintahan Setda	Polres Konawe Selatan	Sumber Pembiayaan Lain
									Polres Konawe Selatan	Kejaksaa Negeri Konse	
19	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan										
19.1	Pembentukan tim koordinasi dengan KPH Gula Raya dan untuk identifikasi dan penyelesaian kebun sawit di dalam Kawasan Hutan			Terbentuknya tim Koordinasi Identifikasi dan Penyelesaian Kebun Sawit di dalam Kawasan Hutan Kabupaten Konawe Selatan	2025	2026	2027	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBN	
									Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Kab. Konse	
19.2	Pendataan lahan perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan			Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2025	2026	2027	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBN	APBD Kab. Konse

						Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan hutan	2025	2026	2027	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara	APBD Prov. Sultra
19.3	Facilitasi penyelesaian permasalahan kebun Kelapa Sawit di dalam kawasan hutan					Adanya mekanisme penyelesaian permasalahan kebun sawit di dalam kawasan hutan	2025	2026	2027				APBD Kab. Konse
20	Program Pengawasan Ketenagakerjaan												
20.1	Sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan					Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala	2025	2026	2027	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		APBD Kab. Konse
20.2	Facilitasi penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan di sektor perkebunan sawit					Jumlah sengketa yang difasilitasi	2025	2026	2027	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelola Dana Perkebunan APBD Kab. Konse Sumber Pembiayaan Lain	

20.3	Pendataan kondisi dan potensi Hubungan Industri di bidang perkebunan kelapa sawit		Data jumlah tenaga kerja dibidang perkebunan kelapa sawit pada perusahaan	2025	2026	2027	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse
21	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							Dinas Lingkungan Hidup	APEN
21.1	Penyelesaian pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Jumlah Penyelesaian Kasus	2025	2026	2027	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse

E. **KOMPONEN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT**

Penerapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- 1 menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
- 2 mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private*) meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun
- 3

No	KEGIATAN (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan 2025 2026 2027			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
E	KOMPONEN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT								
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
22.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2025	2026	2027	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APBD Kab. Konse
		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO				Dinas Koperasi dan UMKM	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perbankan	APBD Prov. Sultra Sumber Pembiayaan Lain

22.2	Fasilitasi kerjasama pekebun calon sertifikasi ISPO dengan pabrik kelapa sawit yang sudah sertifikasi ISPO			MoU Kerjasama antara pekebun dengan PKS untuk menerima TBS yang sertifikasi ISPO	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perusahaan Besar	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Gapoktan BUMDES PERBANKAN	APBD Kab. Konsel Sumber Pembiayaan Lain Badan Pengelola Dana Perkebunan
22.3	Fasilitasi masyarakat untuk proses sertifikasi ISPO			jumlah pekebun atau kelompok pekebun yang sertifikasi ISPO	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perusahaan Besar	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Gapoktan BUMDES PERBANKAN	APBD Kab. Konsel Sumber Pembiayaan Lain Badan Pengelola Dana Perkebunan
22.4	Penghargaan dan Insentif kepada pekebun yang telah bersertifikat ISPO			Jumlah penghargaan dan Insentif bagi pekebun yang telah menerapkan ISPO	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perusahaan Besar	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Gapoktan BUMDES PERBANKAN	APBD Kab. Konsel Sumber Pembiayaan Lain Badan Pengelola Dana Perkebunan

22.5	Peningkatan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemrintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO			Jumlah PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kab. Konseil
				Jumlah perusahaan yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun sebagai syarat mendapatkan ISPO						Asosiasi Petani Kelapa Sawit Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN	APBD Prov. Sultra APBN
22.6	Pelatihan ISPO untuk petugas di Kabupaten Konawe Selatan			Jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN	Badan Pengelola Dana Perkebunan APBD Kab. Konseil
										Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Sumber Pembiayaan Lain
										Dinas Lingkungan Hidup Perusahaan Besar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Gapoktan BUMDES	Badan Pengelola Dana Perkebunan
22.7	Pembentukan kelompok kerja quality control, informasi dan Konsultasi ISPO			Jumlah kelompok Quality control internal (ICS)	2025	2026	2027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Badan Pertanahan Nasional/ATR BPN Badai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kab. Konseil APBD Prov. Sultra APBN

